

LAPORAN KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

TAHUN 2024



Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Singkarsa No. 17 Kandangan PO box 71212,
Telpon (0517) 21066 Faxes. (0517) 21022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Dinas PUTR Tahun 2024 dapat disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024 yang merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Renstra Dinas PUTR Tahun 2024-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini disajikan atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUTR Tahun 2024, Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Disadari dalam penyusunannya masih banyak kelemahan. semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk masa mendatang.

Kandangan, 28 Februari 2025



IDDY SOETEDJO, ST,MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19730130 199803 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Sistematikan Penulisan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Rencana Strategis	5
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	6
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1 Tindak Lanjut Evaluasi AKIP 2023	9
3.2 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024	11
3.3 Analisis Capaian Kinerja per Sasaran Strategis	12
3.4 Realisasi Anggaran	58
3.5 Analisis Efektifitas dan Efisiensi	59
BAB IV PENUTUP.....	61

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan SKPD	6
Tabel 2.2	Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024	7
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2024	13
Tabel 3.1	Matrik Tindak lanjut Rekomendasi APIP atas Hasil Reviu AKIP DPUTR Tahun 2023	9
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	11
Tabel 3.3	Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2024	12
Tabel 3.4	Rekap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024	12
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur kebinamargaan	14
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan 2023-2024	15
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dibandingkan target Renstra Tahun 2026	16
Tabel 3.9	Realisasi dan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan	17
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan	26
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan 2023-2024	26
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dibandingkan target Renstra Tahun 2026	27
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Sanitasi dan Akses Air Minum dibandingkan dengan Realisasi Prov.Kalsel Thun 2024	27
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	29
Tabel 3.15	Capaian Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Kab.HSS TahUN 2024	30

Tabel 3.16	Pengembangan Akses Sanitasi Sehat Tahun 2022-2024	32
Tabel 3.17	Rekapitulasi Desa ODF per Kecamatan Tahun 2024	33
Tabel 3.18	Capaian Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi Kab.Hulu Sungai Selatan Tahun 2024	35
Tabel 3.19	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	37
Tabel 3.20	Target dan Realisasi Kinerja Program Penataan bangunan Gedung Tahun 2024	39
Tabel 3.21	Hubungan Sasaran, Indikator, Meta Indikator dan Sumber Data	41
Tabel 3.22	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	45
Tabel 3.23	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air	48
Tabel 3.24	Hubungan Sasaran, Indikator, Meta Indikator dan Sumber Data	50
Tabel 3.25	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	51
Tabel 3.26	Realisasi Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2022-2024	53
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dibandingkan target Renstra Tahun 2026	54
Tabel 3.28	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	57
Tabel 3.29	Anggaran dan Realisasi Belanja DPUTR Tahun 2024	58
Tabel 3.30	Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	59
Tabel 3.31	Efektifitas Kinerja	60
Tabel 3.32	Efisiensi	61

Bab I berisi :

- ❖ *Latar Belakang*
- ❖ *Sistematika Penulisan*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, Evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
- d. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai perangkat organisasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Kepala Dinas atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator antara lain kesekretariatan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi serta 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu. Adapun perangkat sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian Perencanaan. Disamping itu untuk melaksanakan tugas tertentu dalam membantu tugas Kepala Dinas terdapat beberapa ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu antara lain : Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Penata Ruang dan Pembina Jasa Konstruksi.

Adapun tugas dari masing-masing unit organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembagian tugas sekretariat dijabarkan dalam tiga sub bagian, yaitu
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
 - b. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.
- 2) Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - 3) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase kawasan, sarana prasarana air bersih, sarana prasarana air limbah dan infrastruktur permukiman, penyelenggaraan pembangunan dan penataan bangunan gedung serta penataan lingkungannya yang menjadi kewenangan Daerah.
 - 4) Bidang Sumber Daya Air, mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi, dan operasional pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - 5) Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi tata ruang yang menjadi kebijakan Daerah serta menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan terhadap pengembangan jasa konstruksi Daerah.
 - 6) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a. UPTD Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional Dinas di bidang pengelolaan peralatan dan perbekalan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - b. UPTD Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional Dinas dibidang Pengelolaan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 ini terdiri atas 4 (empat) Bab sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 53 tahun 2014, yaitu:

BAB I Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dan Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II berisi :

- ❖ *Rencana Strategis*
- ❖ *Rencana Kerja Anggaran*
- ❖ *Indikator Kinerja Utama*
- ❖ *Perjanjian Kinerja*

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan rencana pembangunan oleh perangkat daerah tahun 2024-2026. Diharapkan dapat menghasilkan kinerja perangkat daerah yang berorientasi hasil secara berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel melalui cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan serta dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026,

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi urusan yang dilaksanakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan kesatu RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024-2026, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan.

Adapun penjabarannya ke dalam tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Pelayanan Dasar Masyarakat		Indeks Kepuasan layanan infrastruktur	75,58	79,58	82,74
		Terpenuhinya infrastruktur kebinamargaan	Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur kebinamargaan	71,12	71,76	72,40
		Terpenuhinya infrastruktur Keciaptakaryaan	Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur keciptakaryaan	73,30	74,25	75,25
		Terpenuhinya infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	72,75	74,56	76,24
		Terpenuhinya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	71,55	73,90	76,75

2.2 Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Dalam menyusun RKA tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperhatikan prioritas Pembangunan Daerah yang telah di rumuskan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), usulan pemangku kepentingan, ataupun usulan yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri.

Berikut ditampilkan RKA 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tabel 2.2
Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024

Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun + 1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Rp. 28.885.708.995,00
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 18.933.233.341,00
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Barat	Rp. 63.800.000,00
Normalisasi/Restorasi Sungai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Kayu Abang Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Bakarung Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpung, Pantai Ulin Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpung, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Habirau Tengah Kab. Hulu Sungai	Rp. 9.123.639.300,00
		Selatan, Daha Selatan, Banua Hanyar Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Baru Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pandak Daun Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Tambingkar Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Kalumpang Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Siang Gantung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Bajayau	
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Malilingin Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Malutu Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Jelatang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Barat Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Hulu Banyu Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Panggungan	Rp. 9.745.794.041,00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 9.952.475.654,00
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Batang Kulur Kiri	Rp. 1.060.026.152,00

Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	Rp. 5.183.723.394,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	Rp. 707.045.808,00
Rehabilitasi Bendung Irigasi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	Rp. 538.810.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	Rp. 1.310.131.900,00
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Taniran Kubah Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bangkau Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Lungau Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Siang Gantung	Rp. 799.038.400,00
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 353.700.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Rp. 28.859.231.850,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 28.859.231.850,00
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 722.844.000,00
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 28.136.387.850,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Rp. 30.148.043.352,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 30.148.043.352,00
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 829.540.000,00
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 29.318.503.352,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			Rp. 24.551.363.000,00

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 24.551.363.000,00
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 23.826.375.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 724.988.000,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			Rp. 181.316.224.000,00
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			Rp. 181.316.224.000,00
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 180.942.886.000,00
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 373.338.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Rp. 224.806.030.840,00
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			Rp. 224.806.030.840,00
Penggantian Jembatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0
Rekonstruksi Jalan	DBH Sawit DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 201.119.356.840,00
Pemeliharaan Berkala Jalan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 21.289.558.000,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0
Rehabilitasi Jembatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.795.166.000,00
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 601.950.000,00
Rehabilitasi Jalan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0

Pemeliharaan Rutin Jalan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			Rp. 685.363.900,00
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			Rp. 413.469.300,00
Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 12.342.100,00
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.340.000,00
Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 79.600.000,00
Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 8.987.200,00
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 310.200.000,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 82.840.800,00
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 55.775.000,00
Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 7.421.800,00
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 19.644.000,00
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			Rp. 189.053.800,00
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 14.768.400,00
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 162.072.000,00
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 12.213.400,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Rp. 1.558.135.500,00
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			Rp. 398.220.000,00
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 211.420.000,00
Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 11.500.000,00
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 175.300.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 976.842.500,00
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 976.842.500,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 183.073.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 183.073.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 10.145.986.344,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 6.974.800,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.849.900,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.124.900,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 7.942.032.642,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 7.938.283.092,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.499.750,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.124.900,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.124.900,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 20.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 20.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 622.564.952,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.055.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 96.446.552,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 56.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 70.383.400,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 4.680.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 390.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 725.942.600,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 212.402.600,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 513.540.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 828.471.350,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 779.071.350,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 35.000.000,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 14.400.000,00
			Rp. 530.956.087.781,00

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka ditetapkan IKU dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan No 09 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, sebagaimana tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Penanggung Jawab
1	2	3	4	6
1	Terpenuhinya Infrastruktur Kebinamargaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur Kebinamargaan	Bidang Bina Marga
2	Terpenuhinya Infrastruktur Keciptakarya	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakarya	Membantu memastikan representasi kebutuhan dan harapan terhadap infrastruktur keciptakarya.	Bidang Cipta Karya
3	Terpenuhinya Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ persepsi pengguna (P3A/Poktan) atas pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air
4	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ persepsi pengguna layanan penyelenggaraan penataan ruang	Bidang Tata Ruang dan jasa Konstruksi

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Adapun kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2022
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya infrastruktur kebinamargaan	Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur kebinamargaan	Angka	71,12
2	Terpenuhinya infrastruktur Keciaptakarya	Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur keciaptakarya	Angka	73,30
3	Terpenuhinya infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	Angka	72,75
4	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Angka	71,55

Program	Anggaran
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 30.086.793.380,00
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 21.044.474.401,00
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 16.464.146.869,00
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 3.155.507.000,00
5. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp166.874.743.080,00
6. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp116.884.844.037,00
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 1.365.378.800,00
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 1.619.755.500,00

Kandangan, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



ANDRI,AP, MAP

Pihak Kedua
Kepala Dinas PUTR,



Tedy Soetedjo, ST, MT
NIP. 19730130 199803 1 009

Bab III berisi :

- ❖ *Tindaklanjut Evaluasi AKIP 2023*
- ❖ *Capaian Kinerja Tahun 2024*
- ❖ *Analisa Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis*
- ❖ *Realisasi Anggaran*
- ❖ *Analisis Efektivitas dan Efisiensi*

BAB III AKUNTABILITAS**3.1. Tindak lanjut Evaluasi AKIP 2023**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun sebelumnya (tahun 2023) telah dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku APIP yang dituangkan dalam

dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nomor : 700.1.2/040-KHUSUS/ITDA tanggal 26 Maret 2024 dengan beberapa rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Matrik Tindak lanjut Rekomendasi APIP atas Hasil Reviu AKIP
DPUTR Tahun 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindaklanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/ Progres Penyelesaian
1	Memastikan identifikasi crosscutting yang telah dilakukan pada pohon kinerja memberikan informasi atas kinerja yang menggambarkan sharing outcome, khususnya kinerja Perangkat Daerah yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari Perangkat Daerah lain agar kinerja tersebut dapat tercapai secara optimal	Membuat Pohon Kinerja 2024 lebih baik	1 Dok	April 2024	Sekretaris	Selesai
2	Sinkronisasi indikator dan target kinerja penyesuaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 Tabel TC-28 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan dokumen penetapan Indikator Kinerja	Memperbaiki Laporan Kinerja 2023	1 laporan	Mei 2024	Kasubag Perencanaan	Selesai

	Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan analisis target kinerja pada Laporan Kinerja (LKj).					
3	Memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria relevan dan dapat dicapai (achievable) serta dapat menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.	Membuat Cascading 2024 dengan target kinerja memperhatikan capaian tahun sebelumnya	1 Dok	Mei 2024	Kasubag Perencanaan	Selesai
4	Sinkronisasi target dan realisasi capaian kinerja pada fitur perencanaan dan evaluasi dan penginputan rencana aksi pelaksanaan pengukuran kinerja berkala dengan dilengkapi analisis dan bukti dukung pada aplikasi e-Sakip https://esakip.hulusun.gaiselatankab.go.id .	Memperbaiki data input pada e-sakip	1 bulan	Juni 2023	Admin e-sakip masing-masing bidang	Selesai

Terhadap rekomendasi atas hasil evaluasi Tim Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan pohon kinerja telah dilaksanakan dengan menambahkan informasi atas kinerja yang menggambarkan sharing outcome, khususnya kinerja dinas PUTR yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari Perangkat Daerah lain sehingga target kinerja yang ditetapkan tersebut dapat tercapai.
- b. Laporan kinerja 2023 telah dilakukan perbaikan dengan melakukan sinkronisasi indikator dan target kinerja penyesuaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD kemudian juga menjadi rujukan dalam dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK).

- c. Cascading kinerja 2024 telah disusun dengan memperhatikan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja 2024 sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria relevan dan dapat dicapai.
- d. Melengkapi data inputan pada e-Sakip pada aplikasi e-Sakip <https://esakip.hulusungaiselatankab.go.id>, telah dilaksanakan dengan sinkronisasi target dan realisasi capaian kinerja pada fitur perencanaan dan evaluasi dan penginputan rencana aksi pelaksanaan pengukuran kinerja berkala dan telah dilengkapi analisis dan bukti dukung yang memadai.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan Pengukuran Kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Kode
1.	$\leq 91 - 100 \%$	Baik Sekali	Hijau Tua
2.	$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65 \%$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran

keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta target dan capaian realisasi dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1	Terpenuhinya infrastruktur kebinamargaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	71,12	75,80	106,58%
2	Terpenuhinya Infrastruktur Keciptakarya	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakarya	73,30	76,20	103,96%
3	Terpenuhinya Infrastruktur sumber daya air	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	72,75	75,58	103,89%
4	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	71.55	72.95	101,95%

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2034-2026. Semua target IKU berhasil dicapai seperti tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Rekap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024

Uraian	Tercapai IKU	Tidak tercapai IKU
Sasaran 1	1	0
Sasaran 2	1	0
Sasaran 3	1	0
Sasaran 4	1	0

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja utama , pada tahun 2024 semua target indikator kinerja utama telah tercapai yang akan dijelaskan lebih lanjut berikut ini.

3.3 Analisa Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis

Adapun Analisis Capaian Kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran Strategis 1 : Terpenuhinya Infrastruktur Kebinamargaan

Pengukuran keberhasilan dari terpenuhinya infrastruktur kebinamargaan indikator yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur kebinamargaan dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 3.5 Hubungan Sasaran, Indikator, Meta Indikator dan Sumber Data

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Meta Indikator	Sumber Data
Terpenuhinya Infrastruktur Kebinamargaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan dilaksanakan dengan metode survey Responden dipilih secara acak di lokasi wilayah pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan masing-masing unit pelayanan, responden ditetapkan 25 orang. Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 5 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut: Bobot nilai rata-rata tertimbang= Jumlah Bobot : Jumlah Unsur= 1 : 5 = 0.2 Rumus : $IKLI = \sum \{(n1+n2+n\dots) \times b\} \times Np$ Keterangan : n = Nilai unsur Kepuasan Layanan b = bobot nilai rata-rata tertimbang Np = Nilai penimbang	Kuisi on er respon den

Adapun analisa Capaian Kinerja Sasaran 1 yaitu terpenuhinya infrastruktur kebinamargaan pada Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut ;

Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Berdasarkan hasil survey masyarakat atas Layanan Infrastruktur kebinamargaan diperoleh nilai sebagai berikut :

NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5				
1	3	3	3	3	3				
2	3	4	3	3	4				
3	3	3	3	3	4				
4	3	3	3	3	3				
5	3	3	4	3	3				
6	3	3	3	3	3				
7	3	4	3	3	3				
8	2	2	3	3	2				
9	3	3	3	3	3				
10	4	3	4	3	3				
11	3	3	3	3	3				
12	3	3	3	3	4				
13	3	3	3	3	3				
14	3	3	3	3	4				
15	3	3	3	4	3				
16	3	3	3	3	3				
17	3	3	3	3	3				
18	3	3	3	3	4				
19	3	2	3	2	2				
20	3	2	3	3	3				
21	3	3	3	3	3				
22	4	3	3	3	3				
23	3	3	2	3	3				
24	3	3	3	3	3				
25	3	3	3	3	3				
ΣNilai /Unsur	76	74	76	75	78				
NRR / Unsur	3,040	2,960	3,040	3,000	3,120				
NRR tertbg/ unsur	0,608	0,592	0,608	0,600	0,624				
IKM Unit pelayanan						*)	**)		
						3,032	75,800		

Keterangan :
- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,167

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kondisi Prasarana Jalan	3,040
U2	Kondisi Prasarana Jembatan	2,960
		3,040
U3	Ketepatan Pembangunan Jalan dan	
U4	Penanganan Kerusakan	3,000
U5	Penanganan Pengaduan	3,120

IKM UNIT PELAYANAN : 75,80

Mutu Pelayanan : Baik

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur kebinamargaan

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Terpenuhinya Infrastruktur Kebinamargaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	angka	71.12	75.80	106.58%

Berdasarkan realisasi kinerja pada tabel 3.5 dapat disampaikan bahwa realisasi indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 sebesar 75.80. Dengan target kinerja sesuai dengan perjanjian

kinerja tahun 2024 sebesar 71.12, capaian kerjanya sebesar 106,58% atau masuk kategori Sangat Baik.

#Perbandingan Realisasi dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Adapun realisasi kinerja jika dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel.... Berikut ini.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebenamargaan 2023-2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline (Realisasi Tahun 2022)	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Terpenuhinya Infrastruktur Kebenamargaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebenamargaan	angka	69.56	70.56	75.80

Pada tabel di atas menunjukkan perkembangan IKLI kebenamargaan dari beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Realisasi kinerja indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebenamargaan pada tahun 2024 sebesar 75.80 jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada tahun 2023 sebesar 70.56 maka terdapat kenaikan 5.24. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 106,58% dan pada tahun 2023 diperoleh 100,58% sehingga jika dibandingkan terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 5,9%.

#Perbandingan Realisasi Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan

Pada tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024-2026. Adapun realisasi kinerja jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Renstra dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dibandingkan target Renstra Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian
1	Terpenuhinya Infrastruktur Kebinamargaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	75,80	72,40	105%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja 2024 telah mencapai target akhir Renstra, maka hal ini akan menjadi koreksi terhadap penetapan target kinerja pada tahun berikutnya, sehingga target tahun selanjutnya akan dilakukan peninjauan kembali.

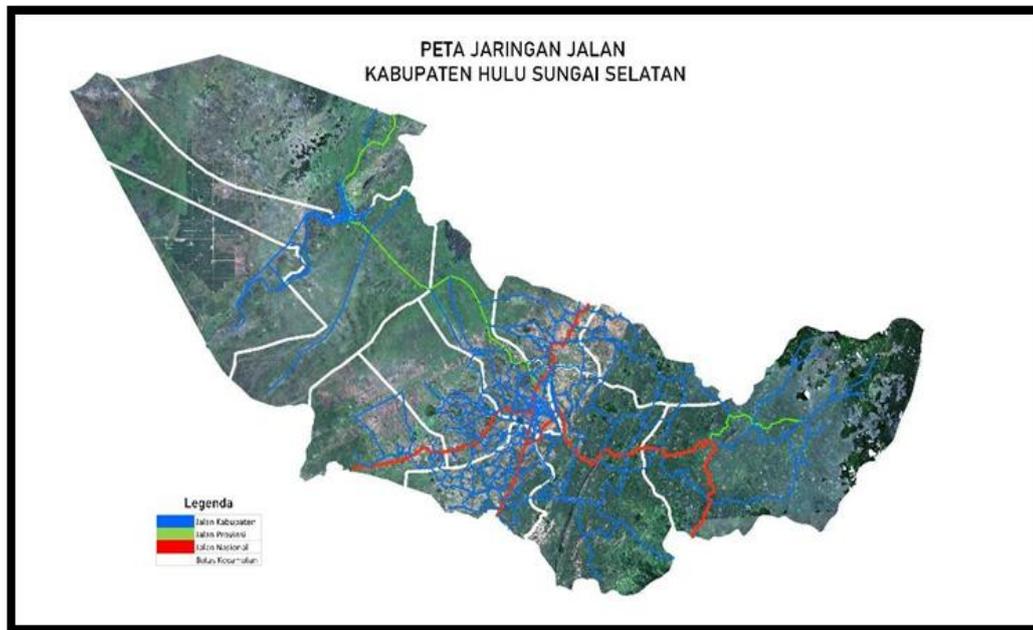
Perbandingan Realisasi Dengan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Lainnya dan Standar Nasional.

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan hanya digunakan untuk mengukur sasaran strategis pemenuhan infrastruktur kebinamargaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun tidak digunakan sebagai pengukuran kinerja tingkat provinsi dan nasional maka tidk bisa dibandingkan. Namun demikian tingkat kemantapan jalan dapat diperbandingkan.

Berdasarkan data yang tersedia, jalan kondisi mantap antara jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten adalah sebagai berikut :

- Kemantapan jalan nasional di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 mencapai 96,31% (Sumber data : Subdit Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga (Maret 2024)
- Kemantapan jalan provinsi di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 mencapai 64,30% (Sumber data : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (SiPDJD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov.Kalsel)

- Kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2024 mencapai 63,60%
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih rendah dibandingkan dengan jalan kewenangan provinsi dan nasional.



Gambar. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

#Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Serta Rencana Tindak Lanjut

Faktor keberhasilan Sasaran Strategis Terpenuhinya Infrastruktur Kebinamargaan dengan indikator “Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan” tahun 2024 didukung dengan Anggaran yang cukup dengan alokasi APBD yang telah di berikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 116,884,844,037.00 (Seratus enam belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah dan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Disamping itu untuk juga didukung dengan kegiatan dari Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Jalan yang melaksanakan rehabilitasi jalan nasional dan pemerintah provinsi melalui Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan untuk rehabilitasi jalan provinsi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Program Yang Mendukung Pencapaian Kinerja dan Foto Hasil Kegiatan.

Untuk mencapai sasaran terpenuhinya penyelenggaraan infrastruktur kebinamargaan didukung oleh program penyelenggaraan jalan . Adapun realisasi pelaksanaan program tersebut dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan

PROGRAM	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya akses jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	63.06	63.60
Meningkatnya koneksi antar wilayah		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	66.17	66.46

Analisis Capaian Kinerja Indikator Program Penyelenggaraan Jalan pada Indikator :

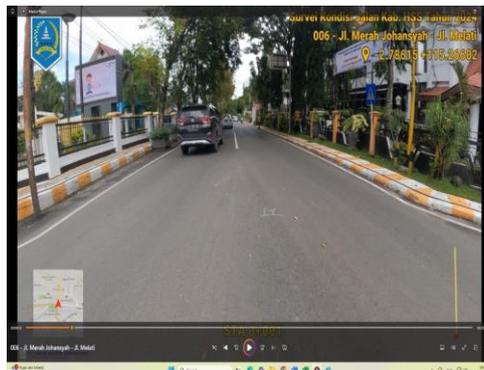
1. Persentase jalan dalam kondisi mantap mencapai 63.60% dari target 63.06% dengan capaian 100.85% dapat dijelaskan bahwa peningkatan tersebut sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan masih berjalan dengan baik meskipun dihadapkan pada tantangan administratif dan teknis hal ini tidak lepas dari peningkatan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu Penggunaan teknologi, seperti sistem manajemen jalan dan teknologi survey kondisi jalan dengan metode PKRMS, memungkinkan dilakukannya pemantauan kondisi jalan secara lebih akurat dan efektif.
2. Persentase jembatan dalam kondisi baik mencapai 66.46% dari target 66.17% dengan capaian 100.43%. Sama halnya dengan kondisi jalan mantap, peningkatan kualitas jembatan juga tidak lepas dari peningkatan anggaran untuk pemeliharaan dan

perbaikan jembatan. Penggunaan teknologi, seperti sistem manajemen jembatan dan teknologi survey kondisi jembatan dengan metode BMS serta adanya peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang pemeliharaan jalan/jembatan memungkinkan dilakukannya pekerjaan pemeliharaan jalan/jembatan secara lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pemenuhan infrastruktur kebinamargaan berjalan sesuai rencana dan bahkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur di masa mendatang.

Pelaksanaan program dan kegiatan lebih lanjut dirinci ke dalam sub kegiatan sebagai berikut :

1. Subkegiatan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 601,950,000.00 (enam ratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 531,750,000.00 (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh lima puluh ribu rupiah) dengan persentase 88,34%



Survey Kondisi Jalan (Metode PKRMS)



Survey Kondisi Jembatan (Metode BMS).

2. Subkegiatan Pembangunan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,737,881,679.00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,546,390,000.00 (empat miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan

persentase 95,96%



Pembangunan Jalan Ruas Muning Tengah –
Pihanin Raya (Batang Alay) Kec. Daha Selatan

3. Subkegiatan Rekonstruksi Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60,619,361,217.00 (enam puluh miliar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 58,732,925,366.00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan persentase 96,89%.



Rekonstruksi Ruas Jalan Samuda – Bajayau Kec. Daha Barat

4. Subkegiatan Rehabilitasi Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,151,050,634.00 (tujuh belas miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16,618,442,634.00 (enam

belas miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan persentase 96,89%



Rehabilitasi Ruas Jalan Angkinang – Tawia Kec. Angkinang

5. Subkegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12,150,387,800.00 (dua belas miliar seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11,872,392,048.00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah) dengan persentase 97,71%



Pemeliharaan Berkala Jalan Pembuatan Siring Pasangan Batu Desa Paring Agung Kec. Sungai Raya

6. Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,018,549,000.00 (tiga miliar delapan belas juta lima

ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,974,898,228.00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan persentase 98,55%



Pemeliharaan Rutin Jalan

7. Subkegiatan Pembangunan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8,362,073,200.00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8,123,038,200.00 (delapan miliar seratus dua puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan persentase 97,14%



Pembangunan Jembatan Desa Batulaki Kec. Padang Batung

8. Subkegiatan Penggantian Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,707,263,237.00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh juta

dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7,481,038,897.00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan persentase 97,06%



Penggantian Jembatan Niman Ruas Tanuhi – Ulang
Kec. Loksado

9. Subkegiatan Rehabilitasi Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 661,190,600.00 (enam ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 658,850,000.00 (enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persentase 99,65%
10. Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,875,136,670.00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,869,110,328.00 (satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan persentase 99,68%



Rehabilitasi Jembatan Desa
Pakan Dalam Kec. Daha Utara



Pemeliharaan Rutin
Jembatan

3.3.2 Sasaran 2 : Terpenuhinya Infrastruktur Keciptakarya

Kinerja Sasaran 2 yaitu Terpenuhinya infrastruktur Keciptakarya diukur dengan satu indikator yaitu indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakarya dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 3.9 Hubungan Sasaran, Indikator, Meta Indikator dan Sumber Data

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Meta Indikator	Sumber Data
Terpenuhinya infrastruktur Kecipta-karya	Indeks Kepuasan Kecipta-karya	Perhitungan Indeks Kepuasan Keciptakarya dilaksanakan dengan survey responden, responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan, responden ditetapkan 25 orang. Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 5 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut: Bobot nilai rata-rata tertimbang= Jumlah Bobot : Jumlah Unsur= 1 : 5 = 0.2 Rumus : $IKLI = \sum \{(n1+n2+n....) \times b\} \times Np$ Keterangan : n = Nilai unsur Kepuasan Layanan b = bobot nilai rata-rata tertimbang Np = Nilai penimbang	Kuisisioner responden

Perbandingan Realisasi Dengan Target Kinerja

Berdasarkan hasil survey masyarakat atas Layanan Infrastruktur kebinamargaan diperoleh nilai sebagai berikut :

**PENGOLAHAN DATA HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR
 BIDANG CIPTA KARYA
 DAN PER UNSUR PELAYANAN**
 : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 : BIDANG CIPTA KARYA

UNIT PELAYANAN
 JENIS LAYANAN

NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN							
	U1	U2	U3	U4	U5			
1	3	3	3	3	3			
2	3	3	4	3	3			
3	3	3	3	3	4			
4	3	3	3	3	3			
5	3	3	3	3	3			
6	4	3	3	3	3			
7	3	3	4	3	3			
8	3	3	3	3	3			
9	4	4	3	3	2			
10	3	4	3	2	3			
11	3	3	3	3	3			
12	3	3	3	3	2			
13	3	3	3	3	3			
14	3	3	3	3	3			
15	4	3	3	3	3			
16	3	3	4	3	3			
17	3	3	4	3	3			
18	3	3	2	4	3			
19	3	3	3	3	3			
20	3	3	3	3	3			
21	4	3	3	2	2			
22	3	3	3	3	3			
23	3	3	4	3	2			
24	3	3	3	3	2			
25	3	3	3	3	3			
Nilai /Unsur	79	77	79	74	72			
NRR / Unsur	3,160	3,080	3,160	2,960	2,880			
NRR tertimbang / unsur	0,632	0,616	0,632	0,592	0,576			
IKM Unit pelayanan						*)	**)	
						3,048	76,200	

Keterangan :
 - U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
 - NRR = Nilai rata-rata
 - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
 - **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
 NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
 NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,25

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi	3,160
U2	Kualitas Air Minum dan Sanitasi	3,080
U3	Ketersediaan Layanan Air Minum dan Sanitasi	3,160
U4	Aspek Sosial	2,960
U5	Aspek Ekonomi	2,880

IKM UNIT PELAYANAN : 76,20

Mutu Pelayanan : Baik

Mutu Pelayanan :			
A (Sangat Baik)	: 81,26 - 100,00	C (Kurang Baik)	: 43,76 - 62,50
B (Baik)	: 62,51 - 81,25	D (Tidak Baik)	: 25,00 - 43,75

Adapun perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Keciptakarya dibandingkan dengan target digambar pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakarya

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Terpenuhinya infrastruktur Keciptakarya	Indeks Kepuasan Keciptakarya	angka	73,30	76,20	103.96%

Berdasarkan realisasi kinerja pada tabel 3.5 dapat disampaikan bahwa realisasi indikator Indeks Kepuasan Keciptakarya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 sebesar 76.2%. Dengan

target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar 73.3%, capaian kinerjanya sebesar 103,96% atau masuk kategori Sangat Baik.

Perbandingan Realisasi dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Adapun realisasi kinerja jika dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciprakarya 2023-2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline (Realisasi Tahun 2022)	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Terpenuhinya Infrastruktur Keciprakarya	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciprakarya	angka	70.20	71.40	76.20

Pada tabel di atas menunjukkan perkembangan IKLI keciprakarya dari beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Perbandingan Realisasi Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan

Pada tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas PUTR Tahun 2024-2026. Adapun realisasi kinerja IKLI Keciprakarya jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dibandingkan target Renstra Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian
1	Terpenuhinya Infrastruktur Keciprakarya	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciprakarya	76.20	75,25	101,26%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja 2024 lebih tinggi dari target akhir Renstra, maka hal ini akan menjadi koreksi terhadap penetapan target kinerja pada tahun berikutnya, sehingga target tahun 2025 akan dilakukan peninjauan kembali.

Perbandingan Realisasi Dengan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Lainnya dan Standar Nasional.

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan hanya digunakan untuk mengukur sasaran strategis pemenuhan infrastruktur kebinamargaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun tidak digunakan sebagai pengukuran kinerja tingkat provinsi dan nasional maka tidak bisa dibandingkan. Namun demikian cakupan akses air minum dan akses sanitasi yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dibandingkan capaian realisasinya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Akses Sanitasi dan Akses Air Minum dibandingkan dengan Realisasi Prov.Kalsel Thun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	
			Kab.HSS	Provinsi
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	%	89,36%	88%
2.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	%	93.36%	82%

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama hanya ada 2 (dua) Indikator yang dapat diperbandingkan dengan realisasi capaian tingkat provinsi yaitu indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman dan indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak, dimana realisasi tingkat kabupaten di atas realisasi tingkat nasional. Hal ini karena kedua indikator tersebut merupakan indikator SPM Urusan wajib pelayanan dasar yang merupakan kinerja nasional dan juga diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku pengampu

urusan wajib pelayanan dasar bidang air minum dan sanitasi, sednagkan indikator lainnya tidak menjadi ukuran kinerja nasional sehingga tidak bisa disandingkan.

Program Yang Mendukung Pencapaian Kinerja dan Foto Hasil Kegiatan.

Program yang diampu oleh Bidang Cipta Karya untuk mendukung kinerja IKLI keciptakaryaannya sebanyak 4 program dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak dipilih sebagai indikator kinerja karena merupakan salah satu standar pelayanan minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten. Air bersih layak adalah air bersih yang bersumber dari air dalam jaringan perpipaan dan air permukaan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi dan layak digunakan sebagai sumber air minum setelah dilakukan pengolahan. Capaian rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak digambar pada tabel berikut.

Tabel 3.14

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCAME)	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Sarana Sanitasi dan Air Minum aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase akses air minum layak	%	96,43	93,36	96,82

Jumlah penduduk yang telah memiliki akses air bersih sampai dengan tahun lalu sebanyak 50.732 KK dan untuk meningkatkan akses air bersih maka pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan rehabilitasi, perluasan dan pembangunan sarana prasarana air bersih dengan prioritas kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga yang memiliki balita stunting. Pada wilayah yang telah tersedia jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dilaksanakan pemasangan sambungan ke rumah penduduk (SR). Sedangkan pada wilayah yang belum ada jaringan perpipaan dilakukan pembangunan menara air dan sambungan ke rumah penduduk dengan jumlah rumah tangga sasaran sebanyak 1.824 KK. Dengan demikian sampai dengan tahun 2024 jumlah penduduk yang telah memiliki akses air bersih berjumlah 52.556 KK atau jika dibandingkan dengan jumlah KK se Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 93,36 persentase. Dengan demikian target awal sebesar 96,43% tidak tercapai, hal ini perlu kerja keras, karena sebaran penduduk perdesaan yang tidak merata dan acak, luasnya wilayah kabupaten sehingga akses perpipaan air minum membutuhkan dana yang lebih besar daripada di daerah perkotaan. Sebagai rencana aksi ke depan akan diupayakan dengan melaksanakan program SPAM perdesaan untuk menjangkau rumah tangga yang belum tersedia jaringan perpipaan air minum yang dikelola PDAM.

Sumber air bersih masyarakat berasal dari jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi seperti air sumur dalam, penampungan mata air. Adapun sebaran jumlah KK yang telah memiliki akses sarana air bersih layak per wilayah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15 Capaian Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
Kab.HSS TahUN 2024

No	Kecamatan	Terlayani JP Unit Rumah	Terlayani BJP Unit Rumah
1	Angkinang	4392	792

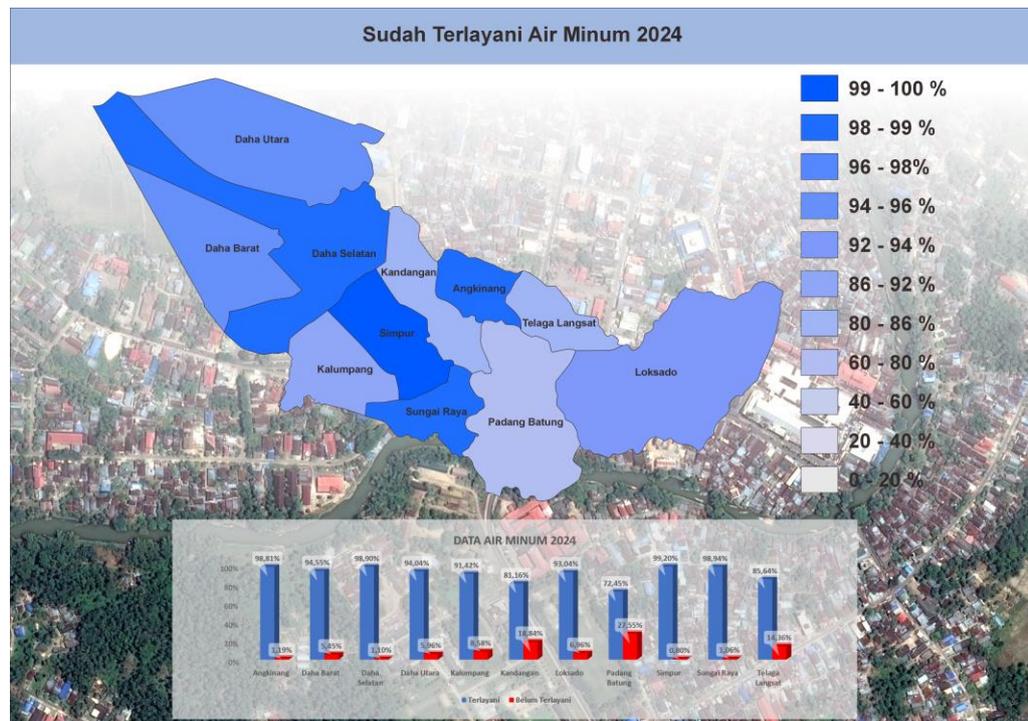
2	Daha Barat	1160	152
3	Daha Selatan	7164	792
4	Daha Utara	4091	152
5	Kalumpang	1057	993
6	Kandangan	7774	1377
7	Loksado	1162	743
8	Padang Batung	2747	4438
9	Simpur	3051	1111
10	Sungai Raya	3318	1937
11	Telaga Langsat	1971	1049
Jumlah		37.887	14.669
Total Keseluruhan			52.556 KK
Jumlah KK se Kab.HSS			56.296 KK
Persentase			93,36%

Sumber Data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Keterangan :

JP : Jaringan Perpipaan ; BJP : Bukan Jaringan Perpipaan

Pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mendapatkan sumber air bersih melalui jaringan perpipaan, namun sebagian bersumber pada bukan jaringan perpipaan tapi dari sumber lain yang terlindungi, umumnya. Adapun sebaran capaian perwilayah kecamatan lebih jelas dapat dilihat pada peta wilayah dibawah ini.



Pada peta di atas untuk wilayah kecamatan dengan warna biru semakin tua menunjukkan akses masyarakat terhadap air bersih sebagai sumber air minum semakin besar.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan alokasi anggaran yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebesar Rp. 21.044.474.401,00 (Dua Puluh Satu Milyar Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat ratus Satu Rupiah) didalamnya memuat kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota terdapat dua sub kegiatan yaitu:

- a. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 631.844.000;
- c. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.412.630.401,00;

Pada Kegiatan ini realisasi anggarannya sebesar Rp. 20.953.497.917,00 dengan persentase 99,57%



Gambar. Menara Air
Desa Bamban Utara



Gambar. Menara Air
Desa Gambah Dalam



Gambar. Sumur Bor



Gambar. Sambungan Rumah

Permasalahan pencapaian rumah tangga yang memiliki akses sarana air bersih layak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan sebaran penduduk perdesaan yang tidak merata dan acak, luasnya wilayah kabupaten sehingga akses perpipaan air bersih membutuhkan dana yang lebih besar daripada di daerah perkotaan. Untuk memperluas akses air bersih akan selalu diupayakan untuk memperoleh sumber pendanaan disamping dari APBD melalui DAU juga usulan kegiatan DAK.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Indikator sebagai alat ukur keberhasilan program ini yaitu Persentase akses sanitasi sehat. Adapun realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16
Perkembangan Akses Sanitasi Sehat Tahun 2022-2024

Program	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase akses sanitasi sehat	85,90%	87,44%	89,37%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan akses masyarakat terhadap sanitasi sehat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, namun demikian tantangan yang dihadapi juga cukup berat antara lain adanya kebiasaan turun

menurun masyarakat khususnya yang tinggal dibantaran sungai amandit dan Negara yang buang air di sungai. Hal ini akan menjadi perhatian yang serius dalam rangka meningkatkan sanitasi masyarakat yang layak. Adapun rencana aksi ke depan yang dilakukan dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat (PHBS).

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui penyediaan pelayanan sanitasi dasar juga merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan pada akhirnya diharapkan semua penduduk memiliki akses sanitasi dasar yang layak khususnya sarana prasarana buang air besar. Penuntasan masyarakat untuk tidak buang air sembarangan (BABS) sangat penting dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan desa yang memiliki sertifikat ODF (*open defecation free*). Sampai dengan tahun 2024, beberapa Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mendapatkan sertifikat ODF. Hal ini dapat dilihat pada data tabel di bawah ini.

Tabel. 3.17 Rekapitulasi Desa ODF per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa ODF	Desa belum ODF	Jumlah Desa/Kel
1	Kec. Angkinang	11	0	11
2	Kec. Daha Barat	-	7	7
3	Kec. Daha Selatan	10	6	16
4	Kec. Daha Utara	2	17	19
5	Kec. Kalumpang	6	3	9
6	Kec. Kandangan	12	6	18
7	Kec. Loksado	1	10	11
8	Kec. Padang Batung	11	6	17
9	Kec. Simpur	11	-	11
10	Kec. Sungai Raya	15	3	18
11	Kec. Telaga Langsat	8	3	11
Jumlah		87	61	148

Sumber Data Dinas Kesehatan

Jumlah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bebas BABS sampai dengan tahun 2024 sebanyak 87 Desa sedangkan Desa yang belum bebas BABS yaitu sebanyak 61 Desa/Kelurahan. Hal ini disebabkan disamping karena keterbatasan sarana BAB juga untuk merubah perilaku masyarakat untuk tidak buang air sembarangan perlu waktu khususnya masyarakat yang tinggal dekat dengan bantaran sungai dimana sampai tahun 2023 jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi sebanyak 49.228 KK.

Adapun jumlah KK yang telah memiliki akses Sanitasi per wilayah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.18
Capaian Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi Kab.Hulu Sungai Selatan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Target	Realisasi							
		Total	Tanpa Akses	JSP	JSPP	Sharing	Akses Dasar (JSP + JSPP + Sharing)	Akses Layak (JSP + JSPP)	Akses Aman SPALD-S (JSP)	Akses Aman SPALD-T
		(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)					
1	Simpur	4134	0	3786	323	25	4134	4109	3786	101
2	Sungai Raya	4793	18	4340	432	3	4775	4772	4340	342
3	Angkinang	5225	50	4402	773	0	5175	5175	4402	127
4	Kalumpang	1969	9	1604	356	0	1960	1960	1604	0
5	Kandangan	13573	289	12369	854	61	13284	13223	12369	619
6	Padang Batung	5883	48	5006	714	115	5835	5720	5006	88
7	Telaga Langsat	2715	108	2123	458	26	2607	2581	2123	0
8	Loksado	2313	569	1581	49	114	1744	1630	1581	0
9	Daha Selatan	8393	2654	4225	1392	122	5739	5617	4225	86
10	Daha Utara	5939	1584	3383	926	46	4355	4309	3383	311
11	Daha Barat	1359	655	642	62	0	704	704	642	0
Total		56296	5984	43461	6339	512	50312	49800	43461	1674
Persentase Layanan							89,37%	88,46%	77,20%	2,97%
Capaian SPM Akses Dasar							89,37%			

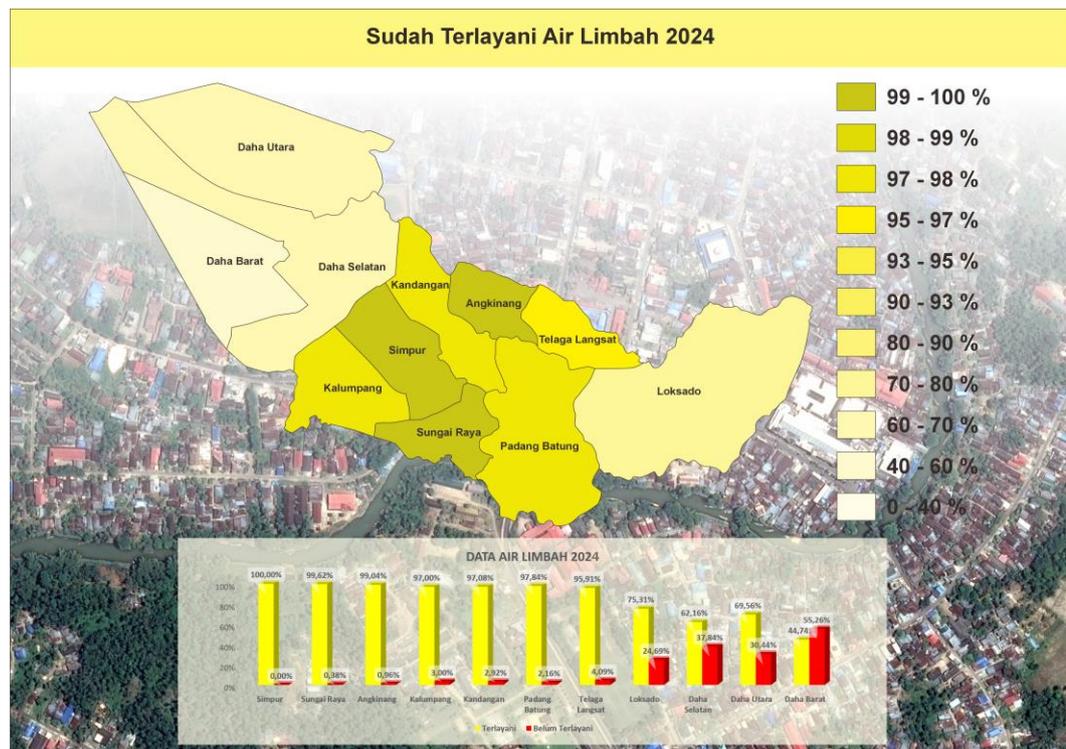
Keterangan :

JSP : Jamban Sehat Permanen ; JSPP : Jamban Sehat Semi Permanen ; Sharing : Masih Menumpang Jamban Sehat

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang secara terus menerus melaksanakan kegiatan pembangunan WC masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah baik melalui anggaran APBD maupun DAK yang pada tahun 2024 sebanyak 1085 KK, sehingga keseluruhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

pada tahun 2024 yang memiliki akses sanitasi layak sebanyak 50.312 KK.

Sebaran akses sanitasi per wilayah Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk jelasnya dapat dilihat pada peta berikut ini.



Pada peta di atas menunjukkan wilayah Kecamatan dengan warna lebih tua masyarakatnya memiliki akses sanitasi lebih tinggi dari pada warna yang lebih muda, dimana Kecamatan Simpur tercatat memiliki akses sanitasi paling tinggi sedangkan yang terendah pada wilayah Kecamatan Daha Barat. Hal ini terjadi karena masih adanya tradisi kebiasaan masyarakat untuk buang air besar di sungai.

Untuk menunjang pencapaian kinerja akses sarana sanitasi layak, dilaksanakan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan alokasi anggaran yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebesar Rp. 16.464.146.869,00 (Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ratus Enam

puluh Sembilan Rupiah) didalamnya memuat Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota terdapat dua sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.751.606.869;
- b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 712.540.000;

Pada Kegiatan ini realisasi anggarannya sebesar Rp. 16.109.509.462,00 dengan persentase 97,85%



Gambar. Bilik Wc dan Septictank Program Gebrak Sehati



Gambar. Bilik Wc dan Septictank Desa Kayu Abang

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini dilaksanakan dalam rangka mengatasi gebangan air khususnya di wilayah perkotaan, adapun realisasi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Lama dan Tinggi Genangan Air	Jam, cm	7 jam 35 cm	7 jam 35 cm	100,00

Analisis capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase melalui Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan pada tahun 2024 didapat panjang saluran drainase yang terbangun sepanjang 781,2 m, panjang saluran drainase yang terpelihara sepanjang 8069 m dan panjang saluran drainase terehabilitasi sepanjang 455 m.
2. Program ini dengan alokasi anggaran yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebesar Rp. 3.155.507.000,00 (Tiga Milyar seratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) didalamnya memuat Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota terdapat tiga sub kegiatan yaitu:
 - a. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.769.835.000;
 - b. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 234.890.000;
 - c. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.150.782.000;Pada Kegiatan ini realisasi anggarannya sebesar Rp. 3.098.841.241,00 dengan persentase 98,2%.



Gambar. Pembangunan Saluran Drainase
Desa Jambu Hilir



Gambar. Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Drainase Perkotaan

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini dilaksanakan dalam rangka untuk penyediaan bangunan pemerintah untuk pelayanan publik. . Adapun realisasi kinerja program tersebut dapat dilihat pada tabel ... berikut ini.

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Kinerja Program
Penataan bangunan Gedung Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Pembanguna Publik yang layak	%	71,41	71,41	100%

Berdasarkan realisasi kinerja pada tabel 3.9 dapat disampaikan bahwa realisasi indikator persentase bangunan publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 telah mencapai target.

Analisis capaian kinerja Program Penataan Bangunan Gedung sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2024 bangunan yang terbangun yaitu Pembangunan Gedung Pemuda/Sekretariat KNPI, Pembangunan Depo Arsip, Pembangunan UMKM Kuliner Kawasan Islamic Center, Pembangunan Rumah Dinas Kejari Kab. HSS, Pembangunan Pintu Gerbang dan Pagar Kawasan Islamic Center, Pembangunan Jalan Masuk Ponpes Ibnu Mas'ud Putra, Pembangunan Rumah Jabatan dan Subdenpom VI/2-1 Kandangan, Pembangunan Gedung Satreskrim dan Sattahti, Pembangunan Gedung Logistik/Samapta, Pembangunan Ruang Kantin Polres HSS, Interior Loby Polres HSS dan Pembangunan Pagar dan Urugan Lahan Satreskrim dan Sattahti. Bangunan yang direhabilitasi pada tahun 2024 antara lain Rehabilitasi Aula Kodim Kab. HSS, Rehabilitasi Gedung Badminton Dr. H.M. Syafii, Kec. Daha Selatan (Lanjutan), Rehabilitasi Lapangan Bola Kecamatan Simpur,

Rehabilitasi Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Jl. Singakarsa, Rehabilitasi Ruang Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Rehabilitasi Gedung BNN Kab. HSS, Rehabilitasi Kantor, Rumah Jabatan Kajari dan Mushola Kejari Kab. HSS, Renovasi Gedung Aula Bhayangkara (Lanjutan), Peningkatan Rumah Jabatan Kapolres Kab HSS, Rehabilitasi Bangunan MTQ Kab. HSS dan Rehabilitasi Polsek Padang Batung.

- 2) Pada Tahun 2024 telah dilakukan konsultasi persetujuan bangunan gedung (PBG) dengan Tim Profesi Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT). Jumlah Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan sebanyak 91 Dokumen dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebanyak 9 dokumen. Dengan target 100 Dokumen pertahun tentunya sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk program penataan bangunan gedung sebesar Rp. 166.874.743.080,00 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan puluh Rupiah) didalamnya memuat Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terdapat dua sub kegiatan yaitu:

- 1). Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166.379.180.080,00;
- 2). Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan

Bangunan Gedung melalui SIMBG dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 495.563.000;

Pada Kegiatan ini realisasi anggarannya sebesar Rp. 160.090.150.551,00 dengan persentase 95,93%. Beberapa dokumentasi hasil pelaksanaan sub kegiatan dapat dilihat berikut ini.



Rehabilitasi Aula Kodim
Kab. HSS



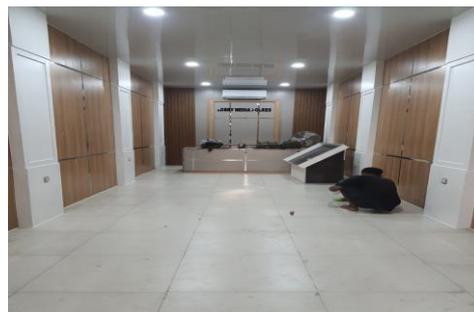
Rehabilitasi Asrama TNI AD Kec. Kandangan



Pembangunan Gedung Satreskrim dan
Sattahti



Pembangunan Gedung Logistik/Samapta



Interior Loby Polres



Pembangunan Gerbang Islamic Center



Pembangunan Gedung Pemuda/Sekretariat KNPI



Pembangunan Depo Arsip



Pembangunan UMKM Kuliner Kawasan Islamic Center



Pembangunan Rumah Jabatan dan Subdenpom VI/2-1 Kandangan



Pembangunan Rumah Dinas Kejari Kab. HSS



Konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung Bersama Tim Profesi Ahli (TPA)

3.3.3 Sasaran 3 : Terpenuhinya Infrastruktur Sumber Daya Air

Kinerja sasaran 3 yaitu Terpenuhinya Infrastruktur Sumber Daya Air dengan 1 indikator yaitu indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 3.21 Hubungan Sasaran, Indikator, Meta Indikator dan Sumber Data

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Meta Indikator	Sumber Data
Terpenuhinya Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya	Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dilaksanakan dengan survey responden. Responden merupakan anggota dari P3A yang dipilih secara	Kuisisioner responden

	Air	<p>acak dan ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan, Responden ditetapkan 25 orang.</p> <p>Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 6 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>Bobot nilai rata-rata tertimbang= Jumlah Bobot : Jumlah Unsur= 1 : 6 = 0.1667</p> <p>Rumus : $IKLI = \sum \{(n1+n2+n....) \times b\} \times Np$</p> <p>Keterangan : n = Nilai unsur Kepuasan Layanan b = bobot nilai rata-rata tertimbang Np = Nilai penimbang</p>	
--	-----	--	--

Kinerja Indikator sasaran yaitu Terpenuhinya Infrastruktur Sumber Daya Air pada Tahun 2024 digambarkan sebagai berikut ;

Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Berdasarkan hasil survey ke responden terhadap kepuasan atas infrastruktur sumber daya air, data diolah dengan hasil sebagai berikut

**PENGOLAHAN DATA HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN
JENIS LAYANAN

: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
: BIDANG SUMBER DAYA AIR

NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN							
	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
1	4	3	4	4	3	3		
2	3	4	4	3	3	3		
3	4	3	3	3	3	3		
4	3	3	3	3	3	4		
5	4	3	3	4	2	4		
6	3	3	4	3	3	2		
7	3	3	4	4	2	2		
8	4	2	3	3	3	4		
9	4	3	3	3	2	3		
10	4	3	3	4	3	2		
11	3	3	3	3	3	4		
12	4	3	3	3	2	2		
13	3	3	4	3	3	3		
14	3	4	3	4	3	4		
15	3	3	3	3	3	3		
16	3	3	2	3	3	3		
17	3	3	3	3	3	3		
18	4	4	3	3	3	3		
19	3	3	4	3	3	3		
20	4	3	3	3	3	3		
21	3	3	3	3	3	3		
22	4	3	4	3	3	3		
23	3	3	4	3	3	3		
24	4	3	4	3	3	3		
25	3	4	3	3	3	3		
Nilai /Unsur	86,0	78	83	80	71,0	76		
NRR / Unsur	3,44	3,12	3,32	3,20	2,84	3,04		
NRR tertbg/ unsur	0,550	0,499	0,531	0,512	0,454	0,486		
IKM Unit pelayanan							*)	**)
							3,034	75,840

Keterangan :
 - U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
 - NRR = Nilai rata-rata
 - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
 - **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
 NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
 NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,25

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Ketersediaan Air Irigasi	3,440
U2	Kualitas Air Irigasi	3,120
U3	Ketersediaan Layanan	3,320
U4	Dukungan Teknis dan Pendidikan	3,200
U5	Aspek Sosial dan Ekonomi	2,840
U6	Dampak Lingkungan	3,040

IKM UNIT PELAYANAN : 75,84

Mutu Pelayanan : Baik

Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air berdasarkan hasil pengolahan data responden adalah 75,84. Adapun perbandingan realisasi dengan target kinerja digambar pada tabel berikut.

Tabel 3.22 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Terpenuhinya Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	angka	72,75	75,58	103,89%

Berdasarkan realisasi kinerja pada tabel 3.4 dapat disampaikan bahwa realisasi indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 sebesar 75,58. Dengan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar 72,75 capaian kinerjanya sebesar 103,89% atau masuk kategori Sangat Baik. Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dihitung berdasarkan survey responden, yaitu dengan rumus total nilai unsur kepuasan layanan dikali bobot nilai tertimbang, kemudian dikali nilai penimbang.

Realisasi kinerja indikator indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air pada tahun 2024 sebesar 75,58. Pada tahun 2024 terdapat perbedaan sasaran dan indikator kinerja utama dengan tahun 2023. Pada Tahun 2023 Indikator Kinerja Utama diukur berdasarkan Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi dengan perhitungan Jumlah ketersediaan air Irigasi (1,2 l Perdet/ha) pada setiap musim tanam dibagi jumlah ketersediaan air irigasi seluruh hektar dikali 100% dengan sasaran meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada tahun 2024, Indikator Kinerja Utama diukur berdasarkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dengan sasaran terpenuhinya infrastruktur sumber daya air sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2023.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Serta Rencana Tindak Lanjut

Faktor keberhasilan Sasaran Strategis Terpenuhinya infrastruktur Sumber Daya Air dengan indikator “Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air” tahun 2024 didukung dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan anggaran sebesar Rp. 30.086.793.380,00 (Tiga puluh miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1). Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana Rp23.069.987.682,00 dan terdapat sub kegiatan :
 - a. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.647.830.402,00;
 - b. Normalisasi/restorasi sungai dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.792.417.080,00;
 - c. Operasi dan Pemeliharaan Sungai dengan alokasi anggaran sebesar Rp583.140.200,00;
 - d. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp46.600.000,00;Pada kegiatan ini realisasi anggarannya sebesar Rp22.005.857.028,00 dengan persentase 95,39%.



Perkuatan Tebing



Normalisasi sungai



Operasi dan Pemeliharaan Sungai



Pembinaan dan Pemberdayaan
Lembaga Pengelola SDA

- 2). Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.016.805.698,00 dan didalamnya terdapat beberapa sub kegiatan, yaitu :
- a. Pembangunan jaringan irigasi Permukaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.713.867.347,00;
 - b. Pembangunan Bendung Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.238.850.000,00;
 - c. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.238.602.199,00;
 - d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.370.131.412,00;
 - e. Rehabilitasi Bendung Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.477.700.000,00;
 - f. Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.658.150.000,00;
 - g. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.918.622.240,00;
 - h. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.882.500,00;
- Pada kegiatan ini realisasi anggaran mencapai Rp6.663.282.857,00 dengan persentase 94,96%.



Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan



Pembangunan Bendung Irigasi DI Pembahasan Kec Kalumpang

Program Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

untuk mencapai kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air didukung oleh program pengelolaan sumber daya air. Adapun realisasi pelaksanaan program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air

PROGRAM	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Kawasan Pertanian yang terlayani jaringan irigasi	%	70,74	70,79	100,07

Analisis Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air pada Indikator :

Rasio Kawasan Pertanian yang terlayani Jaringan Irigasi mencapai 70,79% dari target 70,79% dengan capaian 100,07%, dapat dijelaskan bahwa dari 2 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air (12 Sub Kegiatan) 103 paket pekerjaan selesai 100% dan 2 Paket terjadi Kahar sehingga pekerjaan dihentikan. Untuk menghitung realisasi Rasio Kawasan Pertanian yang terlayani Jaringan Irigasi Bidang Sumber Daya Air setiap tahunnya melaksanakan kegiatan E-PAKSI, dimana data yang dihasilkan terkait hasil survei kondisi bangunan irigasi dengan klasifikasi baik, rusak ringan, rusak sedang dan berat. Rasio Kawasan Pertanian yang terlayani Jaringan Irigasi

merupakan indikator sebagai tolak ukur mengetahui kondisi Infrastruktur irigasi, dengan rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah luas areal yang dapat dilayani}}{\text{Kewenangan ditambah dengan luas irigasi baru yang telah berfungsi}} \times 100\%$$

Berdasarkan data hasil survey E-PAKSI Tahun 2024, diketahui :

Jumlah Luas areal yang dapat dilayani = 7.853 Ha

Jumlah Luas Areal Irigasi Sesuai Kewenangan ditambah dengan Luas Irigasi Baru yang telah berfungsi = 11.094 Ha

Jadi Rasio Kawasan Pertanian yang terlayani Jaringan Irigasi adalah :

$\frac{7.853}{11.094} \times 100\% = 70,79\%$

Perbandingan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dengan capaian relaisasi Tingkat Nasional Tahun 2024

Indikator kinerja yang digunakan tingkat nasional berbeda yaitu meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber daya air berbeda dengan Indikator Kinerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air Dengan demikian pengukuran indikator kinerjanya berbeda sehingga tidak bisa diperbandingkan.

3.3.4 Sasaran 4 : Terpenuhinya Penyelenggaraan Penataan Ruang

Untuk mengukur sasaran Terpenuhinya penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 3.24 Hubungan Sasaran, Indikator, Meta Indikator dan Sumber Data

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Meta Indikator	Sumber Data
Terpenuhinya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Perhitungan Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang (IKPPR) dilaksanakan dengan survey responden, responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan, responden ditetapkan 25 orang. Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 5 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut: Bobot nilai rata-rata tertimbang= Jumlah Bobot : Jumlah Unsur= 1 : 5 = 0.2 Rumus : $IKLI = \sum \{(n_1+n_2+n_3+\dots) \times b\} \times N_p$ Keterangan : n = Nilai unsur Kepuasan Layanan b = bobot nilai rata-rata tertimbang Np = Nilai penimbang	Kuesioner Responden

Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan atas survey responden atas pelayanan penyelenggaraan penataan ruang, nilai Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagai berikut.

**PENGOLAHAN DATA HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
(IKPPR) BIDANG TATA RUANG DAN JASA KONSTRUKSI
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN
JENIS LAYANAN

: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. HSS
: BIDANG TATA RUANG DAN JASA KONSTRUKSI

NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN							
	U1	U2	U3	U4	U5			
1	3	3	3	3	3			
2	4	2	3	3	4			
3	4	2	3	3	2			
4	3	3	3	3	3			
5	4	3	3	3	3			
6	4	3	3	3	4			
7	3	3	3	3	3			
8	3	3	4	3	3			
9	3	3	3	2	2			
10	4	3	2	3	3			
11	3	3	3	2	3			
12	3	3	3	2	3			
13	3	3	3	3	3			
14	3	3	3	3	3			
15	3	3	3	3	3			
16	2	3	2	3	2			
17	3	3	3	3	3			
18	3	3	2	3	3			
19	3	2	3	3	3			
20	3	2	3	3	2			
21	3	2	3	3	2			
22	3	2	3	3	3			
23	3	3	3	3	3			
24	4	3	3	3	3			
25	3	3	2	3	3			
Nilai /Unsur	80	69	72	72	72			
NRR / Unsur	3,200	2,760	2,880	2,880	2,880			
NRR tertbg/ unsur	0,540	0,552	0,576	0,576	0,576			
IKM Unit pelayanan						*)	**)	
						2,920	72,950	

Keterangan :
 - U1 s.d. U5 = Unsur-Unsur pelayanan
 - NRR = Nilai rata-rata
 - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
 - **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
 NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
 NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,25

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kompetensi Petugas	3,200
U2	Kesesuaian Pelayanan	2,760
U3	Kualitas Pelayanan	2,880
U4	Prosedur Pelayanan	2,880
U5	Kecepatan Pelayanan	2,880

IKM UNIT PELAYANAN : 72,95

Mutu Pelayanan : Baik

Dari pengolahan data survey di atas menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan pelayanan sebesar 72,95.

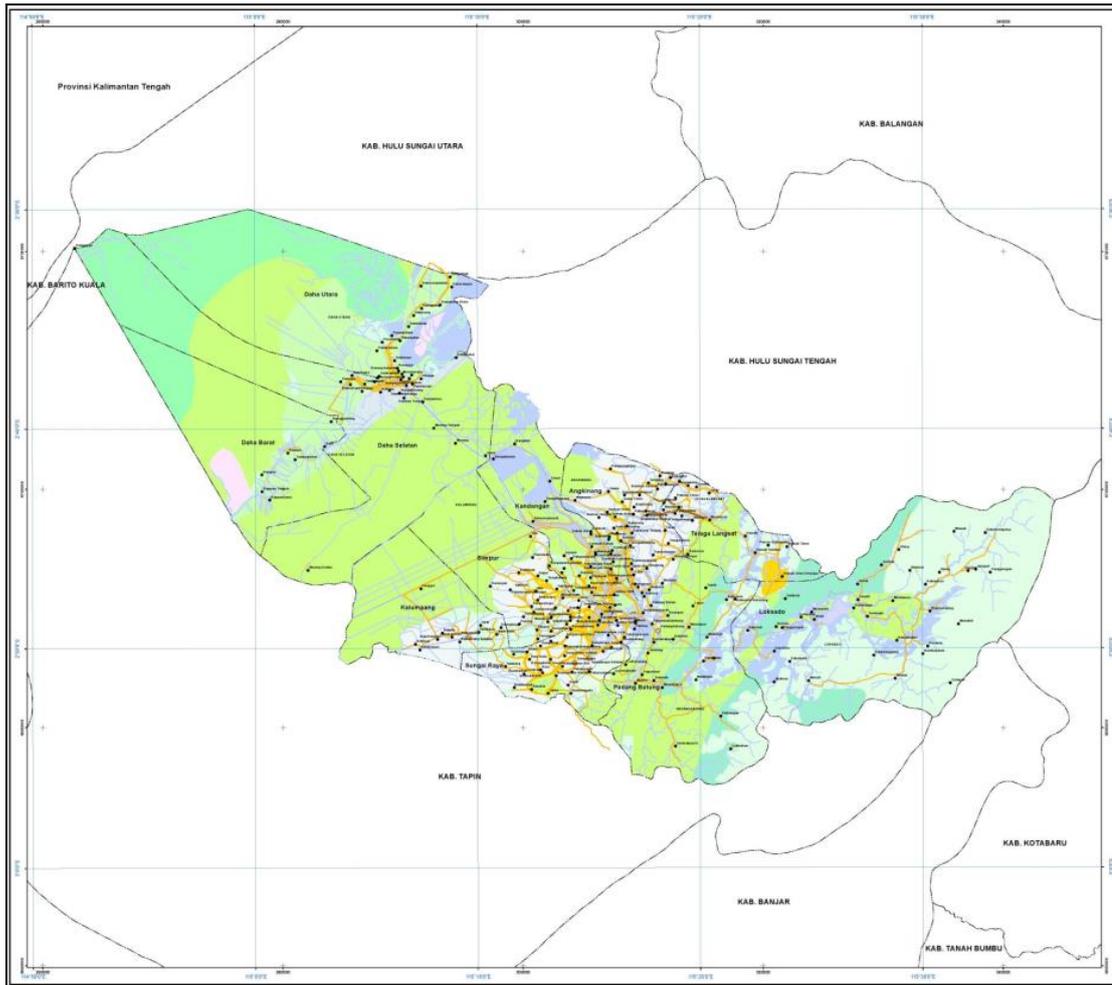
Adapun Capaian Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang bila dibandingkan dengan target digambar pada tabel 3.5 berikut ini,

Tabel 3.25 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Terpenuhinya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	angka	67,9	69,35	71,55	72,95	101,96%

Berdasarkan realisasi kinerja pada tabel 3.25 dapat disampaikan bahwa realisasi indikator Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 sebesar 72.95. Dengan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar 71.55, capaian kinerjanya sebesar 101,96% atau masuk kategori Sangat Baik. Capaian Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang dihitung berdasarkan survey responden, yaitu dengan rumus Total nilai unsur kepuasan layanan dikali bobot nilai tertimbang, kemudian dikali nilai penimbang.

Realisasi kinerja indikator indeks kepuasan penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2024 sebesar 72.95 jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada tahun 2023 sebesar 69.35 maka terdapat kenaikan 3.6. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 101,96% dan pada tahun 2023 diperoleh 100,58% sehingga jika dibandingkan terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 1,38%.



Gambar. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai

Perbandingan Realisasi dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Adapun realisasi Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.7

Tabel 3.26 Realisasi Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2022-2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2022	2023	2024
Terpenuhinya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	67,9	69,35	72,95

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tiga tahun terakhir tahun 2022-2024 menunjukkan perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun.

Perbandingan Realisasi Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan

Pada tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas PUTR Tahun 2024-2026. Adapun realisasi kinerja Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dibandingkan target Renstra Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian
1	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	72,95	76,75	95,04%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja 2024 lebih rendah dari target akhir Renstra. Namun target ini optimis akan dicapai pada pelaksanaan tahun berikutnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor keberhasilan Sasaran Strategis Terpenuhinya penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator “Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang” tahun 2024 didukung dengan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 1.619.755.500,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang diampu oleh Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi yaitu dengan berbagai upaya dilakukan untuk pemenuhan dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kegiatan untuk

pemenuhan dokumen tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dan didalamnya terdapat subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota, subkegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota, serta subkegiatan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 643.597.500,00 (enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), didalamnya mengakomodir Belanja Jasa Tenaga Ahli Pendampingan Kunsultasi Publik, Pendampingan Persetujuan Substansi, dan Pendampingan Penetapan Ranperda Revisi RTRW Kab. HSS serta Raperkada RDTR. Pada kegiatan ini realisasi anggarannya sebesar Rp. 273.164.492,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan persentase 42,44%.



*Harmonisasi Ranperbup RDTR
Kandangan*



Pra Validasi KLHS RDTR KDG

- 2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dan didalamnya terdapat subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 757.550.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), didalamnya mengakomodir Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Pelaksanaan Penyusunan RDTR

Perkotaan Loksado, dan RDTR Perkotaan Daha Selatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Pada kegiatan ini realisasi anggarannya sebesar Rp. 456.708.706,00 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus enam rupiah) dengan persentase 60,29%.



Penyusunan RDTR Perkotaan Daha Selatan



Penyusunan RDTR Perkotaan Loksado

- 3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dan didalamnya terdapat subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 218.608.000,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah), didalamnya mengakomodir Honorarium Narasumber Kabupaten dan Provinsi Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) dan Makan minum rapat FPR, serta Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi. Pada kegiatan ini realisasi anggarannya sebesar Rp. 98.173.839,00 (Sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dengan persentase 44,91%.



Rapat Pokja Forum Penataan Ruang (FPR)

Program Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

untuk mencapai sasaran terpenuhinya penyelenggaraan penataan ruang didukung oleh program penyelenggaraan penataan ruang. Adapun realisasi pelaksanaan program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.28 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

PROGRAM	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemenuhan peta kawasan potensi daerah	%	65	65	100

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja program telah mencapai target. Hal ini dapat dijelaskan bahwa hasil analisis potensi kawasan daerah pada Peraturan Daerah tentang RTRW tersedia 13 potensi daerah dari 20 potensi daerah ideal yang terdiri dari:

- a. Kawasan Pertanian;
- b. Kawasan Agropolitan, dan Kawasan Lindung;
- c. Kawasan Pertambangan, Rencana Sistem Jaringan Energi;
- d. Kawasan Pariwisata;
- e. Kawasan Perikanan, dan Sumber Air Bersih;
- f. Kawasan Industri Mikro, Kecil, dan Menengan;

- g. Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas;
- h. Kawasan Cagar Budaya;
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- j. Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan;
- k. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- l. Kawasan Permukiman; serta
- m. Kawasan Perdagangan dan Jasa.

3.4 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 369.385.338.211 yang digunakan untuk melaksanakan 9 Program dan berdasarkan laporan realisasi keuangan bulan desember 2024, terealisasi sebesar Rp 355.031.389.180,00 Atau 96,11%. Dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.29 Anggaran da Realisasi Belanja DPUTR Tahun 2024

Kode Rek	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
5.1.01	Belanja Pegawai	7.003.188.039,00	6.483.828.494,00	92,58
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.522.675.667,00	52.934.241.881,00	93,65
5.1.03	Belanja Modal	305.864.749.452,00	295.613.318.805,00	96,65
Jumlah		369.390.613.158,00	355.031.389.180,00	96,11

Pada tahun 2024 komposisi Anggaran Dinas PUTR didominasi oleh jenis Belanja Modal mencapai 83%, sedangkan sisanya belanja operasi terdiri atas belanja pegawai sebesar 2 % dan Belanja barang dan jasa sebesar 15%. Hal ini sesuai dengan urusan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan infrastruktur.

Akuntabilitas Keuangan menjelaskan Realisasi Anggaran Belanja per Sasaran SKPD yang mendukung secara langsung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama. Adapun anggaran yang digunakan dalam rangka mencapai kinerja pada masing-masing sasaran strategis terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.30

Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Terpenuhinya Infrastruktur Kebimargaan	Program Penyelenggaraan Jalan	116.884.844.037,	113.408.835.701	97,03
2	Terpenuhinya Infrastruktur Keciptakarya	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21.044.474.401	20.953.497.917	99,57%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.464.146.869	16.109.509.462	97,85%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.155.507.000	3.098.841.241	98,2%.
		Program Penataan Bangunan Gedung	166.874.743.080	160.090.150.551	95,93%.
3	Terpenuhinya Infrastruktur Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	30.086.793.380	28.669.139.885,00	95,29 %
4	Terpenuhinya Penyelenggaraan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.619.755.500,00	828.047.037,00	51,12 %

Pada tabel 3.30 di atas menunjukkan bahwa realisasi keuangan pada masing-masing program untuk menunjang pencapaian sasaran strategis cukup tinggi, kecuali pada program penyelenggaraan penataan ruang. Hal ini karena adanya kendala dalam penyelesaian Perda RTRW ataupun PerKada RDTR, karena dalam tahapan penyelesaiannya melibatkan instansi ditingkat provinsi seperti Badan LH Prov.Kalsel terkait dokumen KLHS, dan beberapa kementerian seperti BIG dan Kementerian ATR/Agraria, sehingga tidak semua kegiatan yang direncanakan terlaksana.

3.6 Analisis Efektifitas dan Efisiensi

Dari pengukurun/penilaian Perubahan Pengukuran Kinerja Tahun 2022 dapat di analisis Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.31 Efektifitas Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja (Realisasi Kinerja / Target Kinerja)*100	Ket
1	Terpenuhinya infrastruktur kebinamargaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	Angka	71,12	75,80	106,58%	Efektif
2	Terpenuhinya Infrastruktur Keciptakarya	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakarya	Angka	73,30	76,20	103,96%	Efektif
3	Terpenuhinya Infrastruktur sumber daya air	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Angka	72,75	75,58	103,89%	Efektif
4	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Angka	71.55	72.95	101,95%	Efektif
Rata-Rata						104,05%	Efektif

Tingkat efektifitas merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektif. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat efektifitas semua sasaran strategis dengan rata-rata 104,05 % yang menunjukkan bahwa sasaran strategis efektif tercapai.

Adapun tingkat efisiensi anggaran dalam mencapai target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.32 Efisiensi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Efisiensi Kinerja sasaran		
			Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Efisiensi
a	b	c	d	e	f=(d/e)
1	Terpenuhinya infrastruktur kebinamargaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	106,58%	97,03%	1,09
2	Terpenuhinya Infrastruktur Keciptakarya	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakarya	103,96%	97,88%	1,06
3	Terpenuhinya Infrastruktur sumber daya air	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	103,89%	95,29%	1,09
4	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	101,95%	51,12 %	1,99
Rata-Rata Efisiensi					1,30

Efisiensi adalah nilai yang menunjukkan penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja. Semakin besar nilai efisiensi maka semakin baik, Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sangat efisien dalam mencapai target sasaran strategis karena >90 yaitu dengan nilai rata-rata 1,30. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumberdaya dalam hal ini anggaran sangat efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum capaian kinerja Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis, sebagai berikut :
 - a. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kebinamargaan terealisasi 75,80 atau 106,58% dengan kategori “ Baik Sekali”.
 - b. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan terealisasi 76,20 atau 103,96% dengan kategori “ Baik Sekali”.
 - c. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air terealisasi 75,58 atau 103,89% dari target.
 - d. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penataan Ruang terealisasi 72,98 atau 101,95% dari target.

Disamping itu efisiensi anggaran dalam mencapai target kinerja sasaran strategis dengan nilai rata-rata 1,30 kategori Sangat Efisien.

2. Adapun Faktor yang menunjang tercapainya target kinerja tersebut antara lain :
 - a. Sinergitas sumber pendanaan dari APBD sumber DAU dan DAK serta tugas pembantuan, yang berkontribusi dalam meningkatkan infrastruktur jalan, jaringan irigasi serta sarana prasarana air bersih dan sanitasi.

- b. Adanya program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti adanya hibah sarana sanitasi dari Balai Sarana prasarana kementerian PUPR.
3. Berdasarkan analisa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024 untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan organisasi, dengan cara berkoordinasi kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - b. Menghindari penganggaran pekerjaan fisik di anggaran perubahan sebagai antisipasi kondisi alam dan waktu yang sempit dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikhawatirkan tidak selesainya pekerjaan .